BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

Dalam BAB ini dijelaskan tentang tinjauan umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan deskripsi kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat yang menunjang dalam penelitian, untuk lebih jelasnya akan di bahas berikut ini.

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah singkat berdirinya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Saat ini nama dinas PU pengairan diganti menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan peraturan daerah No. 15 Tahun 2000, untuk mengetahui sejarah singkat tentang berdirinya PU pengairan Jawa Barat, kita harus mengetahui dasar-dasar dan landasan hukum terbentuknya Dinas PU pengairan sejak jaman penjajahan sampai sekarang. Perjuangan Dinas PU telah mengalami 3 (tiga) jaman, yaitu :

a. Jaman Penjajahan Belanda

Pada jaman penjajahan yaitu pada tahun 1883 dibentuk Brigade Irigasi (*irrigate brigade*) dibawah pimpinan Ir. Heskes. Setelah itu pada tahun 1889 dibentuk pula bagian irigasi (*agdelling*

irigate) dalam Departement Der Burgeliyke Openbare Warken (*B.O.W).*

Setelah pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Department *BOW,* kemudian terjadi perubahan menjadi Departmen *V En W* atau *Department Verkeer En Waterstaat Ban West Java* yang berkedudukan di Bandung. Dalam *V En W* ini tergabung didalamnya jawatan pengairan, PTT (Pos Telegraf dan Telepon) dan jawatan Lalu Lintas Jalan Raya. Khusus tugas di bidang pengairan diatur dalam :

1. *Algemaene Watereglegment tahun 1963 (sub 1963 No.489)*
2. *Algemaene Waterbeheerverordening (sub 1957 No.503)*
3. *Provincial Waterglement 1940 No.7*

b. Jaman Penjajahan Jepang

Pada jaman Penjajahan Jepang, Dinas PU Pengairan Bernama "Doboko Jimuso" yang dibentuk serta pembagian susunannya sama seperti jaman *V En W.* Setelah Jepang kalah dan Indonesia memproklamasikan Kemerdekaannya, bentuk dan susunan *Doboko Jimuso* masih dipakai akan tetapi personilnya yang dijabat oleh orang-orang Jepang yang diambil alih dengan paksa dan diganti dengan mempertahankan kemerdekaan Bangsa, *V En W* terutamapara pemudanya tidak ketinggalan untuk mempertahankan "Gedung Sate" di Bandung sebagai kantor pusat *V En W.*

c. Jaman Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada Tanggal 3 Desember 1945 di kota Bandung terjadi puncak perjuangan fisik Bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang telah di Proklamasikan dari tangan Penjajahan Belanda dan Jepang serta mengalami puncak perlawanan yang tidak sedikit menumpahkan darah. Pada pertempuran melawan tentara sekutu dalam rangka mempertahankan Gedung pertama dari Dinas Pekerjaan Umum telah gugur 7 (tujuh) orang pemuda warga jawatan Pekerjaan Umum untuk mempertahankan Gedung tersebut yaitu "*V En W",* sekarang dikenal dengan sebutan "Gedung Sate". Oleh karena itu hingga sekarang setiap tanggal 3 Desember dijadikan hari Kebangkitan Pekerjaan Umum.

Setalah Negara Republik Indonesia terbentuk RIS dan pembubaran Negara Bagian Dengan Undang-Undang Nomor 22 / 1945 tentang Otonomi Daerah termasuk pembentukan Provinsi Jawa Barat tahun 1953 dengan PP No. 181 / 1953 dilaksanakan penyerahan tugas-tugas Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat Otonom, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 / 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Jawatan ini diberi nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Kantor Pusat Dinas Pekerjaan Umum sebelum perang kemerdekaan Bertempat di Gedung Sate Bandung, kemudian dinas Pekerjaan Umum dibentuk menjadi 3 (tiga) dinas yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Setelah mengalami perubahan-perubahan yang sifatnya Struktural, Dinas PU Pengairan Daerah Tingkat I Jawa Barat dibentuk berdasarkan peraturan No. 4 Tahun 1988 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas PU Pengairan Daerah Tingkat I Jawa Barat di Jl. Braga No. 137 Bandung dan berdasarkan peraturan Daerah No. 15 / 2000 Dinas PU Pengairan namanya dirubah lagi menjadi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

3.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang akan dibahas berikut ini :

3.1.2.1. Kedudukan Dinas Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berkedudukan sebagai Dinas Daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

3.1.2.2. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

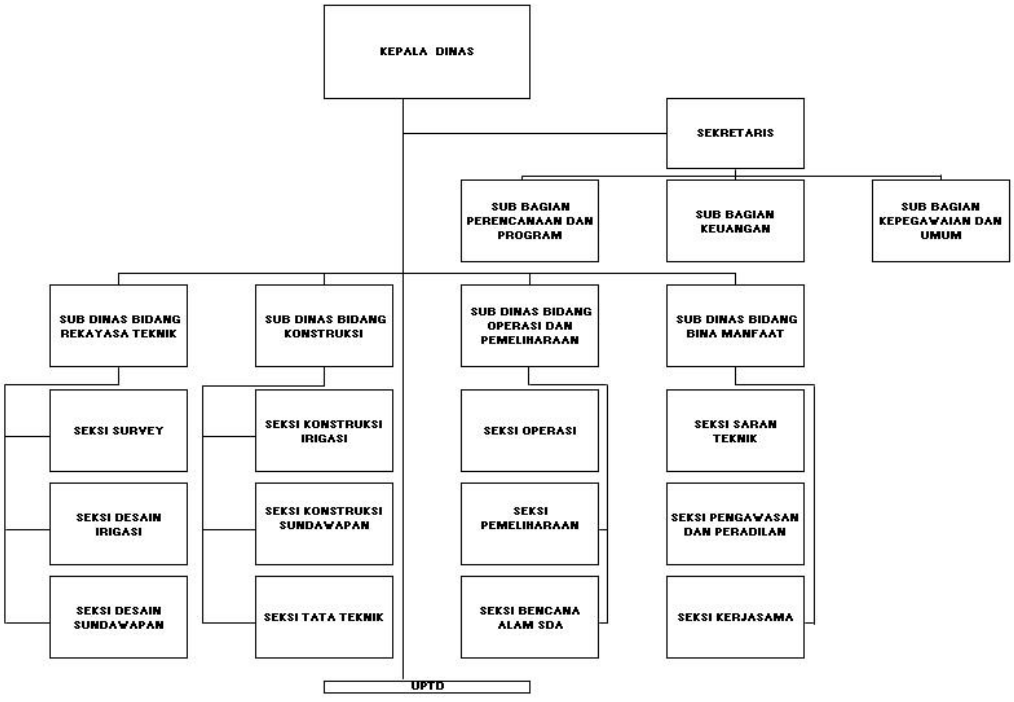
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan kebakan operasional di bidang sumber daya air yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3.1.2.3. Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Pembinaan pelaksanaan operasional dibidang Sumber Daya Air yang meliputi, pembinaan program, pembinaan konservasi dan pelestarian, pembinaan teknik, pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan pemanfaatan.
3. Penyediaan fasilitas dan sistem investasi pengusahaan Sumber Daya Air.

4. Pemberian perizinan pemanfaatan air dan sumber air serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Penyelenggaraan tugas-tugas ketatausahaan.

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.1

Struktur Organisasi

3.3. Deskripsi Kerja

Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air :

a. Kepala Dinas

1. Membantu Gubernur Kepala Tingkat I dalam melaksanakan tugasnya dibidang Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan umum pelaksanaan.
2. Memimpin mendekorasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dinas.
3. Menyusun dan menempatkan program kerja dalam rangka melaksanakan tugas.
4. Memberi informasi, saran dan pertimbangan di bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan.
5. Menyiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian dinas dalm jabatan tertentu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Mengangkat dan menunjuk pegawai dinas dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang kepala bagian, membantu tugas dan tanggung jawab langsung kepada dinas dalam hal :

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan dinas.

2. Memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas.
3. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran rutin dinas.
4. Menyusun dan menyiapkan pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum.
5. Penyelenggaraan pengolahan di bimbingan admisistrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas usaha, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Tata Laksana (Intal)

c. Sub Dinas Bina Program

1. Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang kepala sub dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal :

   1.1 Memimpin dan Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya

   1.2 Menyusun rencana dan pengembangan pengairan

   1.3 Melaksanakan penelitian guna pengembangan pengairan

   1.4 Melaksanakan penyusunan rencana dan program proyek

   1.5 Menyelenggarakan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungannya.

2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Dinas Bina Program dibantu oleh :

    2.1 Seksi Penyusunan Program

    2.2 Seksi Data dan Informasi

    2.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. Sub Dinas Perencanaan Teknis

    1. Sub Dinas Perencanaan Teknis yang dipimpin oleh seorang Kepasa Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal :

        1.1 Memimpin dan Menyelenggarakan kegiatan dalam tugasnya

        1.2 Menyelenggarakan pengukuran dalam Rancang Bangun

        1.3 Melaksanakan bantuan teknik dalam pengumpulan data

        1.4 Membuat perencanaan Bina Konstruksi

        1.5 Melaksanakan penyusunan anggaran biaya

    2. Dalam melaksanakan tugas, Sub bagian dinas perencanaan teknis di bantu oleh :

        2.1 Seksi Rancang Bangun

        2.2 Seksi Bina Konstruksi

        2.3 Seksi Bantuan Teknis

e. Sub Dinas Konservasi dan Pelestarian

    1. Sub Dinas Irigasi yang di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

        1.1 Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidangnya

1.2 Menyusun dan menginvestasikan rencana pelaksanaan

1.3 Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan

1.4 Memberikan saran dan pertimbangan informasi

2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Dinas Konservasi dan Pelestarian dibantu oleh :

2.1 Seksi Konservasi Sumber Daya Air

2.2 Seksi Pelestarian Sumber Daya Air

2.3 Seksi Hidrologi

f. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan

1. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal :

1.1 Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dibidangnya

1.2 Menyusun, menginventarisasikan rencana pelaksanaan dan rencana Pemeliharaan dalam kegiatan yang akan dilakukan

1.3 Menyusun pedoman penanggulangan bencana alam dan bahaya banjir untuk keadaan darurat serta perbaikan dan pengendalian sungai

1.4 Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengembangan operasi dan pemeliharaan untuk pengendalian bencana alam dan bahaya banjir

2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan dibantu oleh :

2.1 Seksi Operasi

2.2 Seksi Pemeliharaan

2.3 Seksi Pengendalian Bencana Banjir dan Kekeringan

g. Sub Dinas Bina Manfaat

1. Sub Dinas Bina Manfaat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal :

1.1 Menyelenggarakan usaha-usaha pencegahan pencemaran air

1.2 Menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan tata air dan tata guna air yang baik

2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Dinas Bina Manfaat dibantu oleh :

2.1 Seksi Kerjasama antar Lembaga

2.2 Seksi Bina Perusahaan

2.3 Seksi Pengawasan Pemanfaatan

3. Seksi-seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Manfaat.

3.4. Fungsi-fungsi Manajemen di Sub Bagian Umum

Fungsi-fungsi Manajemen yang ada di Sub Bagian Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (Planning)

   Dalam Perencanaan di Sub Bagian Umum tidak dilakukan tetapi hanya menjalankan hanya dalam urusan umum saja.

2. Organisasi (Organizationing)

   Organisasi di Sub Bagian Umum yaitu mempermudah pengawasan, mencegah kegiatan yang sama dan menempatkan pegawai sesuai dengan fungsinya dan mengatur kerja untuk menciptakan kerja sama.

3. Penggerakan (Actuating)

   Pergerakan yang dilakukan di Sub Bagian Umum, yaitu :

   a. Pemimpin memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
   b. Pimpinan wajib menerima pendapat dan keluhan dari bawahannya.
   c. Pimpinan memberikan bimbingan dan melakukan instruksi-instruksi pada bawahannya dalam hal pelaksanaan tugasnya.

4. Pengawasan (Controlling)

   Pengawasan di Sub Bagian Umum dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum terhadap para stafnya dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan proses yang berlaku. Fungsi pengawasan ini, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, mencegah penyimpangan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.